

# PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAAN DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

Syarif Mahmud <sup>1</sup>, Lukman Djafar <sup>2</sup>, Herlan <sup>3</sup>

Program Studi Sosiologi  
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak

## ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran mereka mampu untuk mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan dalam komunitasnya.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Pontianak Timur. Dari hasil penelitian diketahui bahwa **pemberdayaan masyarakat melalui** pemungkinan pada program PNPM Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Pontianak Timur, masyarakat mendapatkan pelatihan pengembangan **masyarakat. Melalui penyokongan pada program PNPM, masyarakat mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Penyokongan pada program PNPM telah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan.**Ditinjau dari aspek pengembangan penguatan masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur bisa dikatakan telah memiliki kesadaran yang cukup baik terkait dengan pembangunan lingkungannya. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perlindungan pada Program PNPM Mandiri Perkotaan yang meliputi rangkaian kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), penjaringan relawan, Pemetaan Swadaya (PS), pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan penyusunan PJM Pronangkis, maka secara politis masyarakat telah terlibat dan telah memiliki peran dalam pengelolaan pembangunan dalam komunitasnya.

Kata Kunci: PNPM Mandiri, Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan

---

1

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

## A. PENDAHULUAN

Terjadinya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sangat dirasakan sekali oleh penduduk yang tinggal di perkotaan, khususnya penduduk yang sebelumnya memiliki tingkat pendapatan yang rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Kemiskinan telah banyak mengundang perhatian para pakar ilmu sosial. Teori dan konsep telah banyak dikembangkan dalam upaya menyingkap tabir kemiskinan yang pada gilirannya akan dipakai sebagai pendekatan untuk memerangi kemiskinan.

Masyarakat miskin dipandang sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat baik sebagian maupun seluruh anggotanya yang berada pada standar hidup yang rendah. Masih rendahnya standar hidup dari mereka yang tergolong sebagai penduduk miskin dikategorikan sebagai rumah tangga penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan (Alqadrie, 1993:1).

Kartasasmita (1993:2) menambahkan penduduk dikatakan memiliki standar hidup rendah dimana pada umumnya tingkat ekonomi dan kemampuan berusaha lemah dan terbatasnya akses ke dalam kegiatan ekonomi sehingga mereka semakin tertinggal dari kelompok lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka masyarakat yang tergolong miskin merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan penduduk yang tinggal di kota berkompetisi dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat diasumsikan bahwa masyarakat miskin di perkotaan merupakan masyarakat yang kurang berhasil berkompetisi di sektor ekonomi. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan (Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007).

Dalam Rangka penanggulangan kemiskinan di perkotaan Pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) MP. PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan

berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (<http://pnpm-mpkarangasembali.com/tentang-pnpm/pengertian-dan-tujuan/>)

Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM ini adalah tujuan umum meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khusus

- Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya - upaya penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat (<http://pnpm-mpkarangasembali.com/tentang-pnpm/pengertian-dan-tujuan/>)

Permasalahan yang muncul dengan adanya PNPM MP apakah program tersebut Pontianak benar-benar dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan mampu meningkatkan kemandirian setelah program tersebut berakhir. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, untuk lebih memfokuskan masalah penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM MP di Kecamatan Pontianak Timur?. Dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM MP di Kecamatan Pontianak Timur dan mengungkapkan Perkembangan PNPM MP

## **B. KAJIAN TEORI**

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994) Memberdayakan orang lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya, sehingga pemberdayaan tidak akan jalan jika tidak dilakukan perubahan seluruh budaya organisasi secara mendasar. Perubahan budaya sangat diperlukan untuk mampu

mendukung upaya sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih efektif (Sumaryadi, 2005: 105). Robinson (dalam Maharani, 2012) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ite (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “*empowerment*” yang berarti memberi daya, memberi “power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara umum pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya selaku anggota masyarakat. Dengan adanya pemberdayaan, diharapkan masyarakat memiliki budaya yang proaktif untuk kemajuan bersama, mengenal diri dan lingkungannya serta memiliki sikap bertanggung jawab dan memposisikan dirinya sebagai subjek dalam upaya pembangunan di lingkungannya

Menurut Mullik (2003) Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan wujud dari pengembangan kapasitas (*capacity building*). Inti dari pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah membangkitkan dan memusatkan daya masyarakat. Merupakan suatu kekeliruan kalau ada yang berpikir bahwa pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat. Pemberdayaan tidak berarti memberikan kekuatan kepada masyarakat, melainkan mengelola potensi yang sudah dimiliki tetapi belum diberdayakan untuk menjadi suatu kekuatan sehingga dapat tercapai dampak/hasil yang lebih besar dari suatu kegiatan bersama. Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan artinya masyarakat diizinkan menggunakan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan, tetapi pada saat yang bersamaan mereka harus secara penuh bertanggung jawab atas hasil yang dicapai. (<http://www.indonesia.com/poskup/2003/01/13/EDISI13/h04.htm>)

Dengan demikian jelaslah pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidakmampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat. Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan social ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian masyarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan.

Potensi masyarakat tersebut di atas, dalam hal ini diartikan sebagai “Masyarakat Madani” yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberdayaan masyarakat Warga Madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa, mereka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah lingkungan di

sekitarnya. Dan, secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus, tetapi juga melakukan inisiatif lokal.

Mullik (2003) menyatakan pemberdayaan masyarakat mengandung dua elemen yaitu pemberdaya (baca: pemerintah atau LSM) dan yang diberdayakan (baca: masyarakat). Pemberdayaan masyarakat hanya akan terjadi kalau kedua elemen tersebut mempunyai potensi atau kapasitas (*capacity*). Pemberdaya harus mempunyai kapasitas dan mengetahui cara memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga harus mempunyai cukup pengetahuan, pengalaman, dan motivasi yang dapat dibebaskan, disatukan, dan diarahkan bagi kepentingan pembangunan. Sampai di sini, timbul suatu pertanyaan kecil, sudah berdayakah pemerintah (baca: dinas teknis) untuk memberdayakan masyarakat, dan sudah cukupkah pengalaman dan pengetahuan masyarakat untuk diberdayakan?

Jawaban mutlak terhadap pertanyaan tersebut cukup sulit dan tidak akan dibebaskan di sini, tapi saya mengajak kita untuk melihat kenyataan saat ini. Banyak program pembangunan yang memakai motto pemberdayaan masyarakat dijalankan atas dasar konsep/pemahaman pemberdayaan yang sangat kabur sehingga pemberdayaan menjadi salah arah. Masih banyak pelaksana pembangunan yang menyamakan arti pemberdayaan dengan partisipasi. Akibatnya, masyarakat hanya diajak untuk melegitimasi suatu program tanpa mengetahui persis apa yang dilakukan dan hasil apa yang telah dicapai.

### C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek penelitian. sehingga akan dapat diungkapkan kehidupan sosial yang nampak maupun yang tersembunyi pada masyarakat miskin yang menerima bantuan dengan program (PNPM) MP. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat penerima bantuan (PNPM) MP di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak.

Kegiatan wawancara dilakukan dengan para informan seperti dengan pemimpin formal dan informal seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pontianak, Camat Pontianak Timur, Lurah RT dan Pemuka Masyarakat kota Pontianak serta masyarakat miskin yang berada di lokasi penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini diambil melalui model teknik bola salju (*Snowball Sampling*), sehingga jumlah informan baik pangkal maupun pokok akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Makna istilah informan pangkal menurut Koentjaraningrat (1983:130) adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat, dan mempunyai kemampuan mengintroduksikan data kepada peneliti dan menghubungi informan lain yang ahli tentang sektor-sektor masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang ingin peneliti ketahui. Sedangkan informan pokok adalah mereka yang benar-benar mengetahui mengenai keadaan atau permasalahan yang dijadikan sasaran penelitian. Informan pokok juga disebut dengan informan kunci (*key informant*)

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Pontianak Timur**

Dalam rangka menganalisa pemberdayaan masyarakat melalui pemungkinan pada program PNPM Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Pontianak Timur, peneliti merujuk pendapat Suharto. Menurut Suharto (2009:67) pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Kegiatan pemungkinan dalam PNPM Mandiri Perkotaan terdiri dari tiga rangkaian kegiatan yaitu sosialisasi, pelaksanaan siklus dan kegiatan pelatihan. Kegiatan sosialisasi meliputi serangkaian lobby-lobby, silaturahmi sosial, dan sosialisasi awal program baik kepada perangkat desa/kelurahan, kelompok strategis di desa/kelurahan maupun kepada masyarakat tingkat basis. Kegiatan sosialisasi berupa sosialisasi intensif substansi PNPM Mandiri Perkotaan kepada para relawan, kelompok perempuan dan kelompok rentan.

Rangkaian kegiatan kedua pengembangan kapasitas adalah pelaksanaan siklus pemberdayaan yang dimulai dari refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembangunan BKM, penyusunan PJM Pronangkis, sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dan pemantauan, dan review partisipatif. Jenis kegiatan pengembangan kapasitas adalah kegiatan-kegiatan pelatihan atau *coaching* baik untuk lurah /kepala desa, anggota BKM, pengurus UP, anggota KSM, relawan, maupun masyarakat tingkat basis. Kegiatan pelatihan yang ketiga dilaksanakan diantaranya pelatihan manajemen organisasi, Pelatihan pengelolaan, pembangunan lingkungan, pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan sosial, dan pelatihan lain yang sifatnya khusus seperti pelatihan pembuatan media warga, pelatihan penanggulangan bencana dan pelatihan keterampilan. Adapun bentuk partisipasi yang berlaku untuk menggerakkan masyarakat agar mengerti kebutuhannya yaitu bentuk partisipasi transformasional, artinya antara masyarakat dan pihak luar secara bersama-sama mejadi subyek sekaligus obyek dari program tersebut. Hal ini dinyatakan dengan berdirinya BKM sebagai induk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Timur yang di bentuk beranggotakan para warga masyarakat dari Kecamatan Pontianak Timur yang ditunjuk oleh masyarakat, serta melibatkan fasilitator, adapun program yang bertujuan mengurangi kemiskinan adalah melakukan program usaha pinjaman bergulir pada setiap warga yang sesuai dengan kriteria, dan melalui mekanisme yang berlaku dapat mengajukan menjadi anggota KSM dan berhak menggunakan dana tersebut, program ini adalah sebagai jawaban atau tindak lanjut dari pemetaan masalah warga. Selain itu juga melibatkan fasilitator yang berperan sebagai tenaga ahli dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah setempat.

Sasaran pemberdayaan sosial adalah terciptanya kondisi masyarakat yang mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi dalam komunitasnya untuk kemudian dilakukan pemecahan masalahnya sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki serta dengan memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin didapatkan. Permasalahan sosial yang dimaksud meliputi kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, kesetaraan gender, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Kegiatan penanganan masalah sosial dalam PNPM MP dikelola oleh unit pengelola sosial (UPS) yang berada di bawah koordinasi BKM.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dalam PNPM di Kecamatan Pontianak Timur termasuk sangat kurang dimana dari rencana-rencana kegiatan yang telah

diprogramkan hampir semua belum terlaksana, karena dana kegiatan yang sedianya digunakan untuk kegiatan sosial dialihkan sementara untuk membantu penyediaan jaringan air bersih bagi masyarakat.

Dari keluaran proses perencanaan berupa program yang tersusun, pemberdayaan sosial di Kecamatan Pontianak Timur cukup baik karena sebagian besar benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat sebagaimana hasil pemetaan swadaya sebelumnya, namun dokumen perencanaan seharusnya memuat secara lebih detail skenario dan strategi pelaksanaannya. Strategi dan skenario yang dimaksud adalah sebagai panduan dalam melakukan prioritas dan acuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial sehingga sasaran yang direncanakan benar-benar dapat tercapai.

Dalam rangka meningkatkan potensi program PNPM masih belum dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur. Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Yudiansyah (Penerima Program PNPM Mandiri) mengungkapkan:

“Potensi PNPM di kampung dalam bugis ini tidak dibagikan dalam bentuk usaha tetapi potensi PNPM di kampung dalam bugis ini disalurkan untuk membangun atau melengkapi infrastruktur yang masih kurang seperti air bersih, jalan rusak dan penerangan jalan. Potensi di kampung Bugis ini kalau kita lihat sebenarnya potensinya sangat cocok untuk usaha pembibitan ikan. Karena di kampung Bugis/beting itu wilayahnya berada di atas permukaan air. Tetapi program PNPM nya tidak disalurkan atau digunakan dalam bentuk usaha melainkan pembangunan infrastruktur, Karena dapat dikhawatirkan timbul adanya kecemburuan sosial sesama masyarakat sekitar.”

Searah data sekunder yang telah peneliti dapatkan yaitu Wakil Walikota Pontianak, H. Paryadi S.Hut,MM menyatakan

“Saya, atas nama Pemkot Pontianak merespon positif kegiatan pameran ini PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan tujuan Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan bukan hanya sekedar membagikan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) saja kepada masyarakat. Namun juga merupakan wadah pembelajaran bagi masyarakat terhadap nilai dan etika yang luhur. Masyarakat dibimbing untuk membangun kemitraan dalam mewujudkan keinginan bersama dalam rangka meningkatkan keberdayaan dan kemandirian,. Dana PNPM berasal dari Asian Development Bank (ADB), dikucurkan melalui pemerintah pusat yang diteruskan ke pemerintah daerah untuk disalurkan ke BKM di masing-masing kecamatan, dengan jumlah anggaran 250 juta rupiah tiap kecamatan. 70 persen dari dana tersebut digunakan untuk Insfratruktur, sedangkan sisanya untuk penguatan perekonomian masyarakat sekitar (SuaraAkarRumput.com \_ Suara Akar Rumput.htm).

Berdasarkan data tersebut telah terjadi penyokongan pada program PNPM MP yang bertujuan untuk memampukan masyarakat kecamatan Pontianak Timur sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat miskin. Penyokongan PNPM telah dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya.

Selain memampukan masyarakat Melalui penyokongan pada program PNPM, masyarakat mampu menilai lingkungan sosial ekonominya serta mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu dilakukan perbaikan. Penyokongan pada program PNPM telah mewujudkan masyarakat yang mandiri berkelanjutan. Mandiri adalah langkah lanjut yang rasional dari masyarakat yang telah sejahtera. Dalam kata mandiri telah terkandung pengertian ada usaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pemandirian masyarakat miskin tidak mengabaikan potensi dan kapasitas yang tersisa dalam diri maupun kelompoknya serta menghindarkan diri dari budaya cepat puas.

## **2. Perkembangan PNPM MP di Kecamatan Pontianak Timur**

Kegiatan pengembangan penguatan masyarakat yang secara terus menerus dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan agenda pemberdayaan masyarakat yang lain. Analisis mengenai dampak dari pengembangan penguatan ini tidak bisa dihitung berdasarkan peningkatan jumlah atau angka partisipasi, kuantitas finansial, maupun kuantitas fisik terbangun serta indikator-indikator fisik lainnya, tetapi lebih kepada pencapaian sasaran akhir program yang dapat diukur salah satunya dari peningkatan efektivitas dan efisiensi program yang dijalankan. Untuk itu tingkat perubahan kesadaran ini dapat dianalisis dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap kondisinya saat ini, tumbuhnya motivasi untuk melakukan perubahan menjadi kondisi yang lebih baik serta pengakuan terhadap hasil kegiatan yang telah mereka laksanakan sendiri. Tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur terhadap masalah kemiskinan dan pembangunan di lingkungannya cukup tinggi. Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap anggota komunitasnya disamping didorong oleh serangkaian kegiatan pengembangan penguatan yang selama ini dilaksanakan juga didukung oleh basis nilai-nilai agama yang melekat kuat dalam masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan juga terlihat dari tingkat kekritisannya warga dalam menyampaikan usulan atau kritik terhadap program-program yang dijalankan. Meskipun apabila dilihat secara lebih dekat dapat diketahui bahwa warga yang kritis hanya personil itu-itu saja yang notabene merupakan kelompok elite warga yang antara lain terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa, dan pegawai, namun adanya kelompok warga yang kritis bisa dijadikan sebagai pendorong dan pemacu serta sumber pembelajaran bagi anggota masyarakat yang lain untuk lebih peduli terhadap permasalahan dalam komunitasnya.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi juga nampak dari program-program yang sifatnya general dan tidak hanya menguntungkan satu kelompok saja, hal ini dapat terlihat dari program pembangunan infrastruktur jalan berupa kegiatan pavingisasi dan pengaspalan yang lebih mengutamakan pemerataan untuk semua wilayah atau RT. Dilihat dari sasaran program hal ini sudah tepat karena sebenarnya kelompok sasaran utama dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, sehingga prioritas dalam menentukan kegiatan seharusnya mengacu pada kegiatan yang dampaknya dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat secara langsung.

Motivasi masyarakat untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik secara umum cukup tinggi, dimana masyarakat bersedia secara sukarela terlibat dan menjadi bagian dari program tanpa upah atau insentif apapun. Namun dilihat dari aspek

kemandirian maka motivasi yang dimiliki masyarakat masih belum cukup kuat, hal ini dapat dilihat dari adanya keluhan terhadap berkurangnya peran fasilitator kelurahan pada tahun kedua. Sesuai dengan program dan kebijakan dari koordinator manajemen wilayah pada tahun 2009 terjadi pengurangan jumlah fasilitator sehingga intensitas pertemuan dan interaksi antara fasilitator dengan masyarakat berkurang yang menyebabkan intensitas masyarakat untuk mengelola program juga berkurang, sehingga bisa dikatakan masyarakat masih belum cukup mandiri dan masih memerlukan dukungan dari pihak lain untuk menjaga agar motivasi yang dimiliki masyarakat tidak padam atau hilang.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam PNPM cukup baik, disamping itu masyarakat juga menyatakan kepuasannya terhadap proses pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan. Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM dirasakan dapat menumbuhkan kembali jiwa dan semangat gotong-royong dalam masyarakat yang selama ini mulai berkurang sehingga disamping kepuasan terhadap hasil pembangunannya, juga proses selama pelaksanaan pembangunan tersebut.

Bagi masyarakat di tingkat Kecamatan, keberadaan program PNPM telah dianggap sebagai peluang untuk menyampaikan aspirasinya dalam bentuk usulan-usulan pembangunan yang relatif mudah untuk dapat terrealisasi. Dibandingkan dengan forum perencanaan yang lain seperti Musrenbang yang lingkungannya lebih luas, dimana kemungkinan realisasi kegiatan yang diusulkan juga semakin kecil dimana usulan dari tingkat kecamatan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan yang selanjutnya diakomodir dalam Musrenbang tingkat kabupaten, maka dalam forum PNPM masyarakat merasakan usulan mereka lebih mudah terrealisasi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses perencanaan dan pengakuan terhadap forum dan lembaga yang notabene dijalankan sendiri oleh masyarakat dalam komunitasnya.

Dengan adanya motivasi dan pengakuan masyarakat terhadap proses pelaksanaan program pemberdayaan yang ada di komunitasnya, maka dilihat dari aspek pengembangan penguatan hal ini menunjukkan adanya perubahan kesadaran masyarakat yang dapat membawa dirinya menuju kepada kondisi yang lebih berdaya.

Menurut Bapak M.Said Rahmad (Selaku Ketua RT Parit Bugis Dalam) “Program pemerintah dalam menangani keadaan masyarakat baik dari segi social ekonomi dan politiknya sudah cukup membangun kondisi pada lingkungan masyarakat khususnya di kelurahan dalam bugis yang telaksanakan sejak tahun 2006. Terdapat banyak perubahan pada kondisi lingkungan masyarakat di antaranya kondisi infrastruktur jalan, bedah rumah dll. Daripada ini setidaknya ada beberapa perubahan yang di rasakan oleh masyarakat walaupun tidak maksimal, masih banyak bantuan bantuan lain yang sangat di butuhkan oleh masyarakat kelurahan dalam bugis, terutama adanya pembangunan saluran air ledeng(PDAM) karEna mengingat kondisi lingkungan kelurahan dalam bugis yang mudah tergenangi air sehingga kotoran dan sampah mudah masuk dan menyebabkan air kotor akibatnya masyarakat tidak dapat menggunakan air tersebut karna sudah terkontaminasi oleh sampah.”

Pemberdayaan lingkungan adalah pendekatan dalam pengelolaan atau manajemen pembangunan lingkungan dimana masyarakat diharapkan memilikikeberdayaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan lingkungan di sekitar tempat tinggal atau dalam komunitasnya. Kegiatan pembangunan

lingkungan dalam PNPM inidiorganisir oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL) yang berada di bawah BKM. Pemberdayaan lingkungan sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Pontianak Timur menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini bisa dilihat dari perencanaan pembangunan yang sudah terinci dalam Rencana Tahunan, pembentukan KSM sebagai pelaksana kegiatan, penghimpunan swadaya masyarakat, serta pelaksanaan dan monitoring kegiatan selama dan paska pembangunan.

Ditinjau dari aspek pengembangan penguatan, maka masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur bisa dikatakan telah memiliki kesadaran yang cukup baik terkait dengan pembangunan lingkungannya. Pada tahun pertama kegiatan pembangunan lingkungan banyak terfokus kepada penataan jalan lingkungan berupa gang menjadi jalan aspal. Dengan penataan jalan lingkungan, maka mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah dan lingkungan terlihat lebih rapi dan tertata.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan di Kecamatan Pontianak Timur dilihat dari sisi praktis memang telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinilai mampu mengatasi sebagian permasalahan yang selama ini dirasakan, namun untuk membangun sebuah lingkungan komunitas agar benar-benar tertata dan menjadi komunitas yang lebih maju maka diperlukan suatu konsep penataan lingkungan yang terpadu dan komprehensif.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan dua program pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pemberdayaan masyarakat di perdesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan.

Perlindungan sebenarnya bukan merupakan salah satu komponen tersendiri dalam pemberdayaan masyarakat PNPM MP, namun secara implisit hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam aspek pengembangan perlindungan. Ranah perlindungan yang dimaksud tidak ada kaitannya dengan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perpolitikan negara, terlibat dalam partai politik tertentu maupun politik yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala daerah. Ranah perlindungan disini lebih mengarah pada proses pembentukan dan pengelolaan kepemimpinan dalam masyarakat, kelembagaan kolektif masyarakat, proses pengambilan keputusan, akuntabilitas kelembagaan, channeling, dan meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam pembangunan.

Melihat proses awal program PNPM MP yang meliputi rangkaian kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), penjaringan relawan, Pemetaan Swadaya (PS), pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dan penyusunan PJM Pronangkis, maka secara politis masyarakat telah terlibat dan telah memiliki peran dalam pengelolaan pembangunan dalam komunitasnya. Namun apabila dilihat lebih dalam, maka proses-proses tersebut sebenarnya lebih merupakan rangkaian kegiatan

normatif yang memang telah diprogramkan secara berurutan dan pelaksanaannya terikat oleh waktu dimana peran fasilitator lebih dominan, sehingga partisipasi masyarakat lebih bersifat mengikuti saja, bukan sebagai inisiator atau motor penggerak utama.

Indikator keberdayaan masyarakat dalam ranah politik adalah kondisi dimana masyarakat memiliki kendali dan tanggung jawab penuh terhadap setiap pengambilan keputusan dan perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan dalam komunitasnya. Masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur saat ini bisa dikatakan telah memiliki peran dan posisi tawar yang cukup baik dalam menentukan apa-apa saja yang menyangkut komunitasnya, hal ini pun didukung oleh pernyataan kepala desa yang selalu mendorong agar masyarakat sama-sama belajar untuk bisa secara bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi di desanya.

Selain kepemimpinan dan pengambilan keputusan, aspek politik lainnya adalah menyangkut informasi, jaringan kerja dan akuntabilitas lembaga. Terkait dengan akses informasi dan jaringan kerja dengan pihak luar, belum banyak kegiatan atau program yang dijalankan meskipun sebenarnya terdapat banyak peluang dan kesempatan yang dimungkinkan. Selama ini jaringan kerja yang telah terjalin adalah kerjasama melalui forum BKM baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, namun forum yang terbentuk masih bersifat normatif dan belum menghasilkan keluaran yang nyata dari bentuk kerjasamanya. Peluang-peluang yang selama ini belum dimanfaatkan antara lain kerjasama dengan dunia usaha, kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain serta kerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya yang sifatnya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan tentang pokok-pokok pembahasan dari tesis ini, maka diakhir uraian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya program PNPM Mandiri di Kecamatan Pontianak Timur, masyarakat mendapatkan pelatihan pengembangan. Hal ini dinyatakan dengan berdirinya BKM sebagai induk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur yang ditunjuk oleh masyarakat, serta melibatkan fasilitator. Adapun tujuan program tersebut adalah mengurangi kemiskinan.
2. Program pemberdayaan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola keterampilan yang telah diberikan. Tahap ini dilakukan dengan pemberian pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses sumberdaya ke komunitas masyarakat sebagai jembatan harapan dan eksistensi dirinya.
3. Tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur terhadap masalah kemiskinan dan pembangunan di lingkungannya cukup tinggi. Kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap anggota komunitasnya disamping didorong oleh serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas yang selama ini dilaksanakan juga didukung oleh basis nilai-nilai agama yang melekat kuat dalam masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan juga terlihat dari tingkat kekritisan warga dalam menyampaikan usulan atau kritik terhadap program-program yang dijalankan.

## **2. Rekomendasi**

1. Perlu diadakan juga sistem monitoring secara berkala sehingga nantinya akan diketahui manfaat yang dirasakan dari selesainya proyek tersebut. Peran aktif kelembagaan desa juga sangat diperlukan dalam penentuan program yang diperlukan masyarakat agar program yang dilaksanakan pemerintah tepat sasaran yaitu dalam pengentasan kemiskinan.
2. Program PNPM Mandiri yang mampu memahami dinamika dan prinsip – prinsip yang berlaku dalam masyarakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat beserta keluarganya, maka kebijakan pemerintah yang peduli seyogyanya tidak sekedar dalam bentuk kebijakan melainkan kemudahan mengakses dan fasilitasi pendampingan usaha.
3. Perlu Rangsangan seorang pemimpin terhadap masyarakat sangat diperlukan agar kemauan masyarakat untuk melaksanakan kesepakatan meningkat. Perlu diadakan juga sistem monitoring secara berkala sehingga nantinya akan diketahui manfaat yang dirasakan dari selesainya proyek tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ala, Andre, Bayo, 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta
- Alqadrie, 1993, *Kemiskinan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Tanjungpura, Pontianak
- Foy, Nancy, 1994, *Empowering People at Work*, London: Grower Publishing Company
- Mullik, Marten, 2003, *Pemberdayaan masyarakat, dari mana memulainya* (<http://www.indonesia.com/poskup/2003/01/13/EDISI13/h04.htm>)
- Pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007
- Sarman, Mukhtar dan Sajogyo, 2004. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan : Refleksi Kawasan Timur Indonesia*, Puspa Swara, Jakarta.

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAAN  
DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR  
KOTA PONTIANAK**

*JURNAL ILMIAH*

*Tanggung Jawab Yuridis Pada*

**SYARIF MAHMUD** <sup>4</sup>  
NIM. E. **E01212025**

*Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*

*Telah disetujui untuk penyerahan Jurnal Tesis  
Pada Tanggal, 2016*

*Pembimbing,*

**Dr. H. Lukman Djafar, M.Si** <sup>5</sup>

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
PMIS – Universitas Tanjungpura

**(Dr. Dedi Kusnadi, M.Si)**  
NIP. 196105361987031006

---

<sup>4</sup> PNS

<sup>5</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak